

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika (2010) hal.18

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta, Rineka Cipta (2012) hl. 126.

Cahyono, Heru . *Pengelolaan Dana Desa*. LIPI Press: Jakarta, 2020. hlm. 48.

Hanif, Nurcholis. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga Jakarta, 2011, hlm. 81

Mahmud, Marzuki Peter. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada: Jakarta, 2010, hlm.35.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

Raharjo, Muhammad Mu'iz. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. PT Bumi Aksara: Jakarta, 2022. Hlm, 21.

Raharjo, Muhammad Mu'iz. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. PT Bumi Aksara: Jakarta, 2022, hlm. 10

Silahuddin, M. *Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia: Jakarta, 2015. Hlm. 12.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 2008, hal 52.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008, hlm. 345.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

Widjaja, HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*.

Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2008, hlm. 7.

Yustisia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait*. Visi Media, Jakarta, 2015, hlm. 90.

## **B. Peraturan Perundang – Undangan dan Peraturan Lain**

Keputusan Walikota Pariaman Nomor 30/412/2023 tentang Pengangkatan Tenaga Kerja Pendamping Desa Berdikari Kota Pariaman

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pauh Barat Tahun Anggaran 2021

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Peraturan Walikota Pariaman Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kota Pariaman

Peraturan Walikota Pariaman Nomor 2 Tahun 2021, Lampiran I

Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B

### C. Jurnal/Skripsi

Andora, Hengki. “Desa Sebagai Unit Pemerintahan Terendah di Kota Pariaman”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.2, hlm.4.

Fadhlika, Zulfa ‘Azzah. “*Hukum Pemerintahan Desa: Hubungan Antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa*” Heylaw, Jakarta (2021). Diakses melalui [https://heylaw.id/blog/hukum-pemerintahan-desa-hubungan-antara-kepala-desa-dengan-badan-permusyawaratan-desa\\_pada\\_1\\_Agustus\\_2022](https://heylaw.id/blog/hukum-pemerintahan-desa-hubungan-antara-kepala-desa-dengan-badan-permusyawaratan-desa_pada_1_Agustus_2022).

Fadlan, Ahmad. “Pengertian Dana Desa, Sumber Dana, Alokasi, dan Tujuannya”. Hukumonline: Jakarta (2022). Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/dana-desa-1t61ce6eac3b619> pada 4 November 2022.

Pariaman Kota, *Sejarah Kota Pariaman*, <https://pariamankota.go.id>. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2022 pukul 17:15 WIB.

Putri, Nia Ramadhani. “*Implementasi Kebijakan Dana Desa di Nagari Taruang Taruang Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok*”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang, hlm. 7.

Redaksi DJPb. “Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya”. KPPN Bukittinggi, Sumatera Barat (2021). Diakses melalui <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html> pada 1 Agustus 2022.